

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berangkat dari kontradiksi antara paradigma-paradigma pertumbuhan ekonomi – yang merupakan bagian dari agenda neoliberal - dengan terjadinya praktik akumulasi primitif dalam konteks ekonomi politik pasca otoritarian Indonesia membuat penulis terdorong mendedikasikan penelitian ini dengan judul “Konvergensi Agenda Neoliberalisme dan Relasi Oligarki dalam Keputusan Politik Kereta Cepat Jakarta-Bandung”, proyek transportasi sepanjang 142,3 KM yang menghubungkan antara DKI Jakarta dengan Kota Bandung dimulai dari Stasiun Halim Perdana Kusuma hingga Stasiun Tegalluar di Kota Bandung yang melalui Cikarang (Bekasi), Stasiun Karawang, Stasiun Walini dan Stasiun Tegalluar. Investasi ini akan menghabiskan dana US\$ 5,5 milyar¹, PT Kereta Cepat Indonesia-Cina merupakan perusahaan yang akan menyelenggarakan pembangunan hingga oprasional Kereta cepat. Komposisi perusahaan bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan perusahaan multinasional Kereta Cepat Cina (*China Railway Internastional Co. Ltd*)² dengan komposisi investasi 60 % Indonesia dan 40 % Cina. Keputusan politik Proyek Kereta Cepat ini didasarkan bukan hanya sebagai alternatif tambahan moda transportasi antara dua kota besar namun juga sebagai percepatan pertumbuhan dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah Jawa barat.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang digagas pemerintah Jokowi menjadi pilihan karena ada dua asumsi awal yang penulis miliki, pertama proyek ini di biyai dengan skema “patungan” gabungan konsorsium beberapa Badan usaha milik Negara (BUMN) PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan perusahaan multinasional Kereta Cepat Cina (*China Railway Internastional Co. Ltd*) dengan

¹ Perencanaan anggaran per Februari 2016 dalam *Booklet* Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PT Kereta Cepat Indonesia-China edisi Februari 2016 (hlm. 19).

² Dalam *Press Release* PT WIKA Indonesia mengenai *Groundbreaking* Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Joko Widodo (2016).

dasar hukum Peraturan Presiden (Perpres) No. 107 tahun 2015 dengan komitmen *business to business*³, yang mana proses pendanaan dibebankan oleh institusi negara, BUMN namun memiliki tujuan sangat terbatas-privat. Pengembangan pusat ekonomi baru di wilayah Walini dimana sebagai wilayah hijau, jalur kereta cepat melintasi kawasan proyek pengembangan bisnis, industri dan pemukiman milik Sinarmas *Land*, Kota Deltamas yang berlokasi persis di tepi tol Jakarta-Cikampek, serta pengembangan kota “impian” perusahaan konglomerat Lippo *Group*⁴, Meikarta dekat dengan dari rencana jalur kereta cepat proyek Meikarta semakin strategis karena berada 7 km dari rencana lokasi *Transit Oriented Development* (TOD). Proyek kereta cepat Jakarta Bandung di Karawang⁵, pengembangan Walini sebagai kota baru – KAWIT - di wilayah koridor DKI Jakarta dan Bandung Raya menjadi pilihan rasional karena terjadi kejenuhan perkembangan ekonomi di kedua wilayah tersebut, hal ini yang mana menjadi asumsi penulis kedua, potensi pemburu rente –*rent seeker*- pengembangan pusat ekonomi baru baik berupa pemukiman, pusat industri, dan bahkan pusat kota baru diuntungkan dengan adanya proyek kereta cepat tersebut. Oligark skala tingkat nasional hingga oligark di tingkat lokal memiliki potensi mengakses keuntungan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas Pemerintah.

Sebelumnya bayang-bayang oligarki bukan hal baru dan justru menjadi bagian dalam format ekonomi politik Indonesia sekalipun berakhirnya rezim Orde Baru di tahun 1998. Malaise moneter di bulan November 1997 menegaskan tabiat Orde Baru. Rezim yang bertengger di Indonesia lebih dari tiga darsawarsa ini ditopang oleh organisasi-organisasi politik-ekonomi yang memiliki kepentingan yang kompleks seperti birokrat Negara, jaringan bisnis keluarga Soeharto –

³ Dalam *Booklet Kereta Cepat Jakarta-Bandung*, PT Kereta Cepat Indonesia-China edisi Februari 2016 (hlm. 4)

⁴ Merupakan perusahaan yang didirikan Mochtar Riady, di rezim Orde Baru dekat dengan Soeharto dan menjadi salah satu jaringan konglomerat Soeharto. Di awal reformasi dilaporkan dari beberapa dokumen Lippo Group “menyuplai” modal ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kala itu sebagai patai harapan di masa reformasi (Robison dan Hadiz 2004: 238)

⁵ Dalam laman Yang Ketiban Pulung dengan Mendompleng Proyek Kereta Cepat, <https://amp.tirto.id/yang-ketiban-pulung-dengan-mendompleng-proyek-kereta-cepat-ctEd> (diakses 1 September 2018 pukul 21.26 WIB) serta hasil turun lapangan penulis pada September 2017

cendana -, para pemburu rente (*rent seeker*) atau konglomerat perusahaan multinasional dan kepentingan-kepentingan bisnis yang bermigrasi dari daerah-daerah ke Jakarta (Robison & Hadiz 2004) Di rezim ini konsentrasi kekuasaan pada segelintir elite bisnis dilakukan untuk melakukan penjarahan institusi-institusi Negara, sumber daya alam, dan bahkan agenda demokrasi. Oligarki menjadi stuktur kapital Orde Baru yang memiliki hubungan dengan penguasa sentralistik – Soeharto- yang menguasai arena sosial, arena politik dan arena ekonomi sehingga setiap aktivitas pembangunan, proyek atau bisnis harus selalu menempel pada pusat kekuasaan.

1.1.1. Kapitalisme dan Orde Baru

Asumsi awal dari agenda Neoliberalisme adalah pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Dalam pengalaman Asia dapat dilacak perkembangan Kapitalisme di Negara-negara Asia termasuk Indonesia berada dibawah rezim politik dan ekonomi yang bersifat intervensionis, predatoris, dan otoritarian. Perkembangan kapitalisme di Asia di tiga dasawarsa terakhir harus menyesuaikan dengan rezim otoriter yang berkembang di Negara- Negara Asia pasca gelombang kemerdekaan di tahun 1940-1950-an, hal ini berdampak pada struktur politik, sosial dan ekonomi di Negara-negara Asia. Kehidupan politik dan ekonomi dikendalikan langsung oleh kekuasaan bukan pada pedoman aturan-aturan yang berlaku (Hadiz 2005: 105). Namun hal itu tidak membuat agenda neoliberalisme “terganggu”. Kasus Indonesia sejak Soeharto naik tampuk kepemimpinan di tahun 1965, rezim yang dia bangun – Orde Baru – Soeharto memilih akal rasionalitas dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi kala itu pasca rezim Soekarno, menunjuk kalangan teknokrat dan dekat dengan ekonom neo-klasik barat (Arndt dalam Hadiz 2005: 111) sehingga kedekatan rezim Orde Baru dengan teknokrat barat telah terjadi sejak Orde Baru terbentuk. Negara hadir sebagai kontrol penuh setiap proses ekonomi dari hulu ke hilir. Negara mendominasi sektor-sektor strategis utamanya sumber daya alam. Di awal 1973 kapitalisme Negara mencapai puncak nya. Adanya *boom* minyak dari tahun 1973-1982 membuat pendapatan

Negara meningkat tajam. Hal ini menjadikan Negara melakukan perluasan sektor industrinya, beberapa sektor Negara menanamkan investasi di bidang industri alumunium, besi dan baja, penyulingan minyak bumi, dan industri kertas. Semua digarap dari hulu hingga hilir setiap sektornya (Hill dalam Hadiz 2005: 120). Namun perlu menjadi catatan selama perjalanan Orde Baru Soeharto harus memastikan stabilitas sosial politik, melalui koalisi pendukung kalangan birokrat dan Militer Angkatan darat – ABRI – yang dipelihara dalam “paguyuban” Golongan Karya, jaringan pebisnis (*rent seeker*), serta jejaring Soeharto – keluarga Cendana. Awal kerapuhan malaise ekonomi tidak serta merta faktor eksternal malaise Asia Tenggara di tahun 1990-an, namun di dekade 1980-an terjadi perubahan pola kekuasaan yang mendasar, kebangkitan jaringan keluarga-keluarga bisnis dan politik serta Bergeraknya para pengusaha dari kalangan birokrat dan militer yang berhasil merambah ke pasar modal secara masif. Dengan mengambil alih aset-aset kepemilikan negara oligarki-oligarki publik dan swasta baru ini secara efektif menciptakan suatu sistem ekonomi yang dibebani oleh pinjaman (*over borrowed*), investasi berlebihan (*over-invested*) serta tidak dibatasi oleh hukum (Hadiz 2005: 113)

Kemunculan mata rantai oligarki Indonesia setidaknya berada dipuncak kejayaannya pada tahun 1980-an setelah di dekade 1970-an kabinet pemerintahan Soeharto yang dimotori para kalangan teknokrat ekonomi yang dekat dengan “barat”, 1980-an koalisi politik pendukung Soeharto menguat dan merambah di sektor bisnis. Tepatnya 1986 terjadinya konflik kalangan teknokrat, Soeharto, dan para koalisi pendukung Soeharto baik kalangan birokrat dan keluarga Cendana. Reformasi kebijakan yang membebani kalangan investor asing karena mengharuskan tunduk pada regulasi organik negara, “Ekonomi Pancasila”. Justru menguntungkan para jaringan bisnis Soeharto dan para birokrat negara. Tokoh-tokoh kuat pengusaha seperti Bob Hasan dan Liem Sioe Liong yang menguasai industri plastik dan baja yang terdampak menguntungkan karena kebijakan moratorium impor kala itu (Hadiz 2005: 122). Bukan hanya melalui regulasi formal negara untuk memelihara oligark Negara, Soeharto membentuk beberapa organisasi nirlaba berupa yayasan berbagai bidang. Dimana yayasan tersebut untuk

menyediakannya dana di luar anggaran Negara. Penyedia kapital tentunya dari perusahaan-perusahaan milik Negara, para pembisnis, dan perbankan negara tersebut untuk mendanai berbagai kegiatan pribadi seperti pendanaan operasional Golkar dan pendanaan investasi dan bisnis pribadi keluarga Cendana (Robison 2009: 10).

1.1.2. Pasca Orde Baru: Agenda Neoliberal

Agenda pasca tutup bukunya rezim Orde Baru ialah sistem pasar Neoliberal, namun sekali lagi Neoliberal (isasi) harus dipahami dalam konteks kasus di Indonesia. Kasus Neoliberalisasi di Indonesia dapat menjelaskan mengenai pola hubungan, distribusi kekuasaan, dan dominasi agenda politik ekonomi (Robison & Hadiz 2004: 18). Pondasi kapitalisme yang dibangun Orde Baru memperkuat agenda neoliberalisme secara struktural ekonomi politiknya. Dimana apa yang diharapkan atas berakhirnya rezim Orde Baru runtuh, Soeharto lengser namun warisan piramida kekuasaan Soeharto tidak demikian. Pola kekuasaan yang dulu tersentral di Jakarta yang mendekat ke pusat kekuasaan, Soeharto. Kini jaringan yang dipelihara Soeharto menyebar ke daerah-daerah. Koalisi-koalisi yang dibentuk oleh Soeharto di masa Orde Baru nyatanya melakukan “perlindungan diri” aset dan jaringan bisnis mereka masing-masing serta melakukan reorganisasi atau menata kembali secara kelembagaan kekuasaan mereka di arena-arena sosial dan politik yang lebih tersebar dan terdesentralisasi. Menyebarnya kekuasaan yang sebelumnya terpusat di Jakarta, menyebar ke jaringan kekuasaan-kekuasaan di daerah tidak terelakan lagi. Terlebih dorongan desentralisasi mengemuka dan menjadi salah satu agenda utama reformasi di bidang pemerintahan. Bersamaan dengan itu konflik perebutan kekuasaan ekonomi-politik di daerah dibarengi dengan kemunculan *gangster* dan kekuatan sipil lainnya.

Hal ini berdampak pada suasana ekonomi-politik Indonesia kini. Sentrum kekuasaan yang dulunya terpusat dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda yang diakomodasi langsung oleh Negara kini menyebar bersama agenda desentralisasi. Suasana yang demikian memberikan kesempatan kekuatan lokal, kekuasaan populis untuk menampakan diri dalam sentrum kekuasaan di daerah

dalam kerangka besar agenda Neoliberal. Dalam konteks ekonomi politik, kekuatan-kekuatan yang bangkit tersebut andil dalam berbagai keputusan-keputusan politik baik kebijakan yang diinisiasi Jakarta maupun oleh daerah (provinsi/kab/kota/desa) melalui kekuatan politik kepala daerah walikota/bupati maupun melalui institusi partai politik dan parlemen di daerah (Hadiz 2005: 262).

Fenomena-fenomena dapat diidentifikasi di beberapa proyek strategis nasional yang mana merupakan representasi dari agenda Neoliberalisme justru mampu dimanfaatkan para oligark yang memiliki akses ke Negara karena modal kapital. Proyek nasional Pengembangan Kawasan Teluk Benoa misalnya. proyek yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan yang lebih lanjut mengatur pengembangan kawasan ekonomi dan budaya – sebagai narasi peredanya – di Teluk Benoa. Perpes tersebut ditandatangani di rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Adalah Tomy Winata Konglomerat pemilik PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) sebagai pihak swasta pengembang kawasan Teluk Benoa. Atas nama penyelamatan kawasan teluk Benoa yang sudah terjadi pendangkalan, TWBI mengklaim reklamasi adalah upaya penyelamatan dan proses revitalisasi fungsi Teluk Benoa sebagai muara daerah aliran sungai (DAS) Denpasar Selatan⁶. Bukan hanya karena kedekatan Tomy Winata dengan SBY beberapa laporan investigasi jurnalis mengutarakan bahwa Tomy Winata menjadi dapur pacu pendanaan pencapresan SBY pada tahun 2004⁷ untuk mendapat megaprojek pengembangan kawasan paling strategis tersebut di Bali, Tomy Winata sebelumnya berhasil memainkan melalui perusahaan induknya Artha Graha Group dengan melakukan strategi “investasi sosial dan politik” sejak Orde Baru

⁶ Dalam laporan khusus Tirto.id yang dilakukan pada 16 September 2016 mengenai “Menguruk Benoa” dalam <https://tirto.id/menguruk-benoa-bKUN> (diakses tanggal 14 September 2018, pukul 17.45 WIB)

⁷Diperkuat dalam laporan <https://www.afr.com/lifestyle/anguish-bali-tourist-development--and-the-enigmatic-tomy-winata-20160829-gr3v4> (diakses tanggal 14 September 2018, pukul 18.12 WIB) dan <https://nasional.kompas.com/read/2010/11/26/11222972/Inu.Ungkap.Kedekatan.SBY.sama.Pengusaha> (diakses tanggal 14 September 2018, pukul 19.02 WIB)

baik secara vertikal maupun horizontal untuk memobilisasi dukungan publik (Wardana 2017: 68). Sepak terjang Tomy Winata membangun citra investasi berwawasan lingkungan bukan kali pertama di Teluk Benoa. Pengalaman klaim atas keberhasilan *corporate social responsibility* (CSR) yayasan dari Artha Graha Group dalam pemulihan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung. Bukan tanpa tujuan, Tomy Winata menggelontorkan CSR Artha Graha Group, Tomy membentuk *Tambling Wildlife Nature Conservation* (TWNC) pada 17 Juli 2008⁸, mendapat akses ijin kementerian Hutan kala itu untuk pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebesar 45.000 hektar dengan konsep pengembangan ekonomi berwawasan lingkungan. Cerita heroik di Lampung tersebut digunakan Artha Graha Group melalui TWBI dalam pengelolaan Teluk benoa untuk pengembangan ekonomi berwawasan lingkungan. Berbekal jejaring dengan rezim Susilo Bambang Yudhoyono.

Proyek nasional lainnya yang tidak lepas dari jerat para predatoris yang menggunakan akses Negara dalam kepentingan bisnisnya adalah Proyek Teluk Pantai Utara Jakarta merupakan proyek yang sudah dicanangkan sejak rezim Orde Baru melalui Keputusan Presiden (Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2003 pernah mengeluarkan Surat Keputusan mengenai kajian ketidak layakan kegiatan reklamasi di pantai utara Jakarta tersebut. Setidaknya ada beberapa perusahaan yang berkepentingan dalam proyek reklamasi baik dari perusahaan pemerintah daerah maupun swasta antara lain PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda, PT Pelindo II, PT Manggala Krida Yudha, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Kapuk Naga Indah, PT Jaladri Eka Pasti, PT Taman Harapan Indah, PT Muara Wisesa Samudera, dan PT Jakarta Propertindo menggugat hingga Mahkamah Agung memenangkan para pengusaha dan mencabut putusan Kasasi sebelumnya yang memenangkan Kementerian Lingkungan Hidup sehingga proses reklamasi tetap

⁸ Dalam <http://www.globeasia.com/cover-story/150-richest-indonesians/> (diakses tanggal 15 September 2018, pukul 13.02 WIB)

berlanjut.⁹ Hingga pada akhirnya Keppres No. 52 tahun 1995 diganti melalui Peraturan Presiden (Perpres Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Dalam proyek Teluk Pantai Utara Jakarta bagaimana kekuatan predator pengusaha pengembang yang dapat membajak kepentingan Negara berupa pengembangan wilayah pesisir utara Jakarta tersebut.

Indikasi terlihat ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta M. Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.¹⁰ Kekuatan elite politik lokal menguat seiring dengan penyelenggaraan desentralisasi. Tradisi politik uang dan kekerasan dengan penggunaan *gangster* ditingkat lokal menjadi bagian baru dalam dinamika sosial politik di daerah. Terlebih proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta ini memberikan ruang bagi kepala daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara pelaksanaan reklamasi.

Refleksi dari pengalaman pembangunan strategis di Indonesia dalam hal ini proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung tidak lepas dari bayang-bayang oligarki. Menurut Robison dan Hadiz, oligarki adalah pembajak atas agenda kapitalisme Indonesia di awal 1970-an. Penulis semakin meyakini kekuatan oligarki ada dan terus bermetamorfosis pasca berakhirnya rezim Orde Baru. Terlebih kanon pembangunan mengarah pada investasi multinasional telah menjadi dogma dalam proses sistem pasar neoliberal. Penelitian dengan judul “Konvergensi Agenda Neoliberalisme dan Relasi Oligarki dalam Keputusan Politik Kereta Cepat Jakarta Bandung” sebagai upaya menegaskan agenda neoliberalisme dalam struktur ekonomi politik tanpa menihilkan konteks jaringan oligarki di Indonesia masih membayangi ruang-ruang ekonomi politik di Indonesia.

⁹Laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dalam <https://www.bantuanhukum.or.id/web/memahami-proyek-reklamasi-teluk-jakarta/> (diakses tanggal 15 September 2018, pukul 20.14 WIB)

¹⁰Dalam laman berjudul Mohamad Sanusi Resmi Ditahan KPK <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/02/01043921/Mohamad.Sanusi.Resmi.Ditahan.KPK> (diakses tanggal; 15 September 2018, pukul 10.39 WIB)

1.2 Rumusan Masalah

Pengalaman Indonesia dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, investasi yang dilakukan Cina melalui *China Railway Internastional Co. Ltd* merupakan *Direct Investment* yang lazim secara umum terjadi dalam ruang sistem Neoliberal yang sedang terjadi diberbagai tempat dan sektor lainnya. Penulis mendudukan fenomena universalitas sistem pasar Neoliberal bertegangan dengan kontekstual. Kedekatan Neo-liberalisme dengan oligarki missal, dalam pengalaman Indonesia mempunya akar kesejarahan yang kuat hal ini untuk memahami secara konteks. Penulis semakin yakin bahwa keperkasaan oligarki dan sistem patronase nya semakin menjalar dan menembus di seluruh wilayah dari Jakarta, ke provinsi, kabupaten, kota hingga desa (Hadiz 2005: 260). Malaise ekonomi di akhir Orde Baru hanya jeda bagi para oligark untuk melakukan konsolidasi dan reorganisasi oligark di tingkat lokal karena harus menyesuaikan struktur politik baru pasca Orde Baru. Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung untuk mengeja ulang keberadaan oligarki di celah-celah sistem pasar Neoliberalisme dalam pembangunan kereta cepat.

Pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung merupakan kesepakatan yang sejak awal ditekankan pemerintah dengan komitmen *business to business*. Pemerintah mendelegasikan BUMN dalam hal ini PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia untuk melakukan *Join venture* dengan perusahaan multinasional Kereta Cepat Cina (*China Railway Internastional Co. Ltd*). Proyek yang semula direncanakan menghabiskan dana US\$5.2 milyar naik menjadi US\$6 milyar. Jalur atau trase yang akan dilalui kereta cepat untuk menghubungkan dua kota besar Jakarta dan Bandung sepanjang 142,3 KM. Sebelumnya pembagian saham mayoritas dipegang oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebesar 10 persen dan *China Railway International Co.Ltd* sebesar 40 persen berbalik Cina memegang mayoritas saham sebesar 90 persen, ini karena permintaan Presiden Jokowi atas beban *joint venture* BUMN PT Pilar Sinergi BUMN yang mengalami beban

peningkatan anggaran proyek sebesar US\$ 6 milyar yang sekaligus untuk mengurangi resiko kerugian yang lebih besar.¹¹

Proyek kereta cepat ini diputuskan secara cepat oleh Presiden Jokowi, setidaknya setelah lawatannya ke Cina pada akhir tahun 2014 dalam pertemuan KTT APEC ke-22 di Beijing, pada Maret 2015 Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN, Rini Soemarmo melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina sekaligus melakukan penandatanganan kesepakatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, sejak itu Cina secara resmi menjadi pesaing utama Jepang dalam proyek kereta cepat di Indonesia.¹² Polemik mulai terjadi pasca penandatanganan tersebut, Menteri Perhubungan kala itu Ignasius Jonan menolak atas proyek kereta cepat tersebut, ada tiga syarat yang tidak dipenuhi dalam proyek kereta cepat tersebut, yaitu terbentuknya badan usaha, trase atau jalur yang disepakati dan ditetapkan, dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (Tempo 2016). Namun pada 21 Juni 2016 Jokowi tetap melakukan *groundbreaking* tanpa kehadiran Ignasius Jonan. Konflik tidak hanya pada tingkat aktor saja, namun pada dasar hukum proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 tahun 2015 mengenai Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Bandung. Pada pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan “Pelaksanaan penugasan dan Belanja Negara dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah”.

Namun dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, Kereta cepat (*High Speed Railway*) Jakarta Bandung masuk di dalamnya. Konsekuensi selanjutnya adalah proyek yang ada dalam Perpres No. 58 Tahun 2017 tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam pengerjaan kereta cepat turut dalam resiko bisnis

¹¹ Lihat *indonesiato see high speed rail costs swell amid changes* <http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/15/indonesiato-see-high-speed-rail-costs-swell-amid-changes.html> (diakses 23 September 2018, pukul 16.30 WIB)

¹² Lihat Suhendra 2018, *Proyek Kereta Cepat, Ketika Cina Menelikung Jepang*, Tirto.id, 20 Mei 2016, <https://tirto.id/proyek-kereta-cepat-ketika-cina-menelikung-jepang-865> (diakses tanggal 23 September 2018, pukul 16.07 WIB)

kereta cepat tersebut. Negara secara tidak langsung turut beresiko dalam usaha kereta cepat.

Sehingga dalam mengeksplorasi masalah-masalah, penulis berorientasi pada penyelidikan dan asumsi-asumsi kritis untuk menjangkau ke dalaman dari permasalahan penelitian (Kusman 2019: 7). Setidaknya ada beberapa yang harus dibangun sejak awal dalam pencapaian ke dalaman dengan orientasi penyelidikan kritis; pertama hubungan kekuasaan mampu masuk dalam lapisan ide, dalam konteks penelitian ini Neoliberalisme dipahami berbarengan realitas kekuasaan dan struktur politik Indonesia belakangan ini – dan kesejarahannya ekonomi-politik Indonesia; kedua, terdapat kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang dominan menggunakan kekuatan koersif pada kelompok-kelompok bawah, seperti halnya kelompok masyarakat yang memiliki akses dan aset kapital untuk melakukan tindakan koersif masyarakat bawah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tindakan-tindakan perluasan kekuatan dan kekuasaannya. Hal ini terjadi dalam pembangunan kereta cepat, bagaimana proses akumulasi kapital berkonsekuensi pada masyarakat terdampak proyek kereta cepat; dan ketiga apa yang disajikan dan temuan realitas sosial nantinya tidak lepas dari kepentingan sosial.

Berangkat dari pola dan kesadaran penyelidikan kritis tersebut, penulis menaruh perhatian penelitian pada tiga hal penting dalam proyek kereta cepat, Pertama, proyek kereta cepat yang diharapkan pemerintah sebagai upaya membentuk pusat-pusat ekonomi baru di wilayah jalur/trase kereta cepat utamanya di wilayah Karawang dan Walini¹³ memunculkan pemburu rente –*rent seeker*– tanah dilakukan oleh spekulan tanah dan para pengembang (*developer*) utamanya di wilayah Karawang (Jawa Barat), Walini (Jawa Barat) sebagai titik rencana pengembangan ekonomi. Terlebih pengembang (*developer*) besar yang sudah sejak Orde Baru turut memanfaatkan pembangunan kereta cepat seperti Lippo Group

¹³ dalam *Booklet Kereta Cepat Jakarta-Bandung*, PT Kereta Cepat Indonesia-China edisi Februari 2016

dengan Meikarta dan Sinarmas land dengan Delta Mas kota mandiri. Seperti yang diketahui para pengembang nasional tersebut sejak Orde Baru memiliki akses kedekatan dengan Soeharto. Akses-akses proyek pengembangan baik industri maupun perumahan diberikan oleh Soeharto, sehingga para pengembang tersebut juga menjadi bagian dari jaringan kekuasaan oligarki Orde Baru (Robison 2009: 212). Asumsi ini kian berkembang ketika masyarakat asli di wilayah terdampak kereta cepat akan tergusur dari wilayah asli mereka untuk pusat pengembangan wilayah ekonomi baru. Pengembangan TOD di empat titik utamanya di Karawang dan Walini memungkinkannya pemisahannya secara paksa antara pemilik produksi dan alat produksinya -petani dan lahannya. serta kegiatan proyek kereta cepat acap kali berdampak pada ruang-ruang sosial yang pula merupakan dampak dari utamanya di wilayah Jawa Barat karena mayoritas jalur/trase berada di provinsi tersebut.

Kedua, Laporan Walhi (2016) mengenai Ancaman Dampak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada lingkungan. Disebutkan bahwa ada kawasan perkebunan, perdesaan, pertanian pangan, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi di kawasan Walini akan terdampak jalur/trase kereta cepat yang berpotensi pada kawasan resapan air dan ekologi di wilayah terdampak. Sebagai informasi awal, kawasan Walini berlokasi di Kecamatan Cikalongwetan merupakan pemasok air bersih di kawasan Bandung Raya dan mayoritas merupakan lahan perkebunan.

Dan Ketiga, ini juga didukung lemahnya advokasi masyarakat sipil mengenai keputusan kereta cepat Jakarta Bandung yang berdampak baik bagi masyarakat kelas bawah dan dampak ekologi di kawasan hijau di wilayah Jawa Barat. Setidaknya koalisi #FORJABAR yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Barat, Walhi Jawa Barat, dan beberapa gabungan masyarakat tolak proyek kereta cepat Jawa barat yang berbasis di Kota Bandung bubar pada tahun 2017 yang lalu¹⁴. Hal ini dampak dari terjadinya diorganisasi secara sistematis

¹⁴ Pengamatan penulis ketika turun lapangan di kota Bandung pada semester dua tahun 2017.

terhadap *civil society* yang sudah terjadi di rezim Orde Baru (Hadiz 2005: 260). Narasi Neoliberalisme mampu menjelaskan hingga hari ini – dalam kereta cepat – bahwa pembangunan kereta cepat mampu menumbuhkan ekonomi baru dan penciptaan pertumbuhan dan ekonomiyang inklusif bagi masyarakat – yang berdampak utamanya.

Realitas konvergensi Neoliberalisme dan oligarki inilah yang menjadi fokus utama untuk membongkar agenda tersebut dengan tanpa menihilkan makna bahwa proyek ini bukan semata-mata investasi multinasional yang melibatkan dua negara – praktek khas neoliberal - namun perampasan aset negara dalam praktik akumulasi kapital yang disponsori negara serta praktek oligarki melebur di dalamnya. Meminjam istilah dari Robison menyebut Oligarki sebagai koalisi bisnis politik di Indonesia, mereka memiliki kemampuan untuk mengatur kembali kekuasaan mereka sekalipun rezim otoriter telah runtuh (Robison 2006: 7). Penelitian ini sekaligus menjelaskan bagaimana penjelasan dari beberapa sarjana politik dan sosiologi mengenai terjadinya ketegangan universalitas dan kontekstual dalam hal ini agenda besar ekonomi Neoliberalisme dan Oligarki. Sehingga didapatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Neoliberalisme dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung?
2. Mengapa terjadi konvergensi agenda Neoliberalisme dengan relasi kekuasaan oligarki dalam kereta cepat Jakarta-Bandung?
3. Apa dampak sosial ekonomi masyarakat atas konvegerasi agenda Neoliberalisme dengan relasi oligarki?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Atas dasar kegelisahan penulis akan agenda Neoliberalisme yang memenuhi ruang-ruang ekonomi politik tidak berlebihan penelitian dengan judul “Konvergensi Agenda Neoliberalisme dan Relasi Oligarki dalam Keputusan Politik Kereta Cepat Jakarta Bandung” mencoba sedikit membongkar agenda Neoliberalisme tanpa menihilkan beroperasinya oligarki dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung. Sekaligus upaya penulis melacak relasi Negara dan kaum kapitalis (Pengembang, pemburu rente, dsb) yang menggunakan institusi Negara untuk melakukan perlindungan diri dari lingkungan yang mungkin tidak akan menerima atau resistensi sosial ketika melakukan bisnis atau perluasan kapital mereka (Harvey 2010: 100; Hadiz 2005: 126). Beroperasinya Neoliberalisme pasca otoritarian di Indonesia berimbas pada terjadinya akumulasi kapital melalui penjarahan, penghancuran ruang-ruang sosial. Terakhir penulis ingin melihat konsolidasi masyarakat sipil atas kekuatan oligarki dan kapital yang sedang beroperasi di wilayah mereka, terutama titik dimana sebagai rencana pusat ekonomi baru Karawang dan Walini (Jawa Barat).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis Ingin membuka peluang kembali perkembangan analisa ekonomi politik dalam disiplin ilmu politik. Adapun beberapa manfaat yang penulis upayakan:

1.3.2.1 Manfaat akademis

- Sebagai kajian kritis mengenai perkembangan Neoliberalisme di Indonesia
- Untuk melihat dari perspektif yang berbeda perihal rezim pembangunan di negara berkembang dimana terdapat minor di dalam implementasinya.

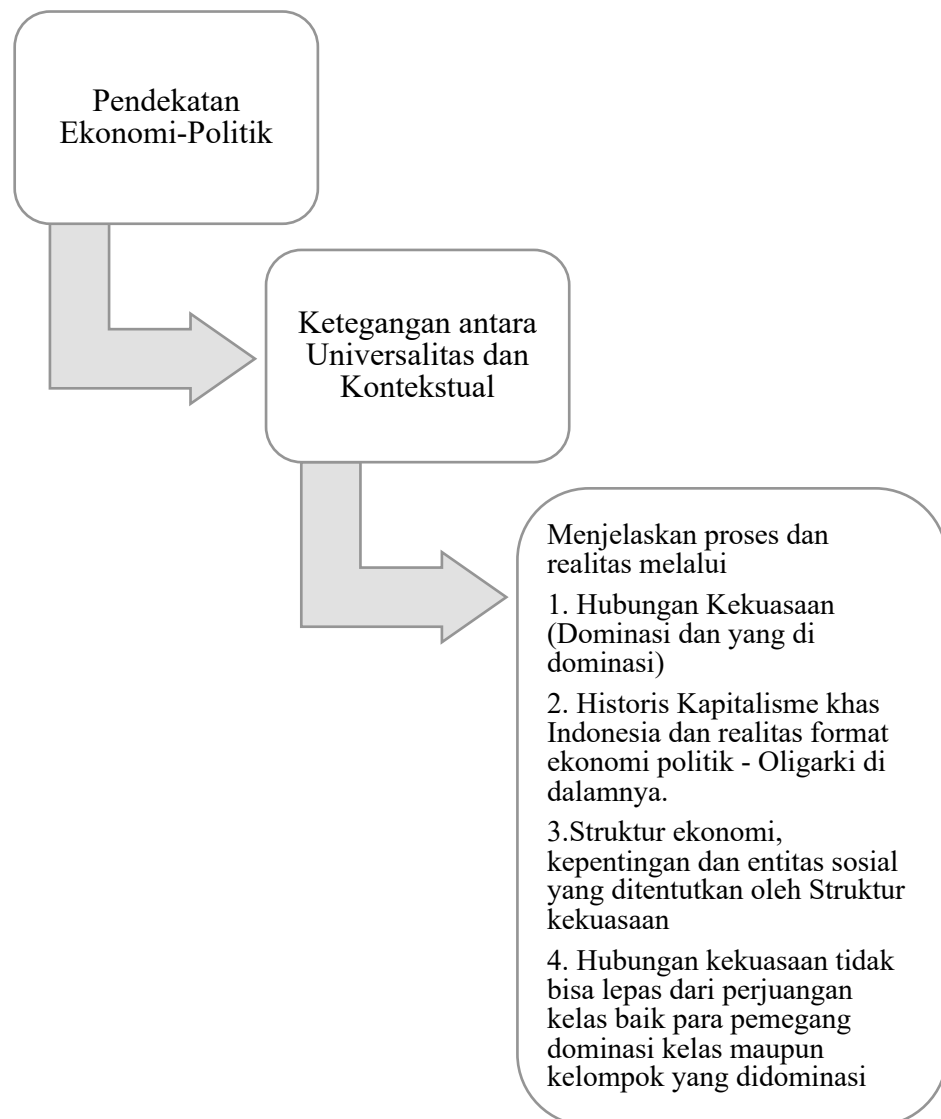
- Sebagai upaya menambah kajian baru perkembangan kajian oligarki Indonesia pasca otoritarian.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

- Sebagai rujukan kajian mengenai tantangan pembangunan demokrasi Indonesia era kontemporer.
- Sebagai rujukan pembuat kebijakan dalam aspek sosial dan politik untuk membaca perkembangan ekonomi baik nasional maupun lokal.

1.4 Kerangka Konseptual dan Teoritik

Menjelaskan dan mengeksplorasi masalah-masalah dibutuhkan metodologis yang berorientasi pada pendekatan kritis (Kusman, 2019). Pertama, dalam menjelaskan Neoliberalisme, sebelumnya penulis menggunakan alur kerangka pemikiran sebagai berikut. Dengan menggunakan kerangka analisa ekonomi-politik, mula-mula menjelaskan agenda neoliberalisme pasca rezim otoritarian. Dari pemahaman awal tersebut, oligarki menjadi respon dan realitas ekonomi politik yang ada atas agenda neoliberalisme pasca rezim otoritarian di Indonesia. Kemudian penulis akan fokus menjelaskan beroperasinya Neoliberalisme sebagai tawaran teoritik untuk menganalisa keputusan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dimana sebagai praktek akumulasi kapital yang dilakukan oleh negara dalam pemanfaatan investasi -kapital- multinasional dengan menyertakan realitas ekonomi politik Indonesia.



*Bagan 1.1: Alur Berpikir Penelitian
Sumber: diolah penulis*

1.4.1 Kerangka Teoritik

Kerangka analisa ekonomi politik oligarki menjadi bagian dalam kajian besar mengenai Neoliberalisme yang terjadi di Asia yang berlangsung dibawah rezim otoritarianisme yang bersifat intervensionis dan predatoris. Bagi Hadiz dan begitu juga penganut mahzab Murdoch lainnya, Oligarki merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi Neoliberalisme. Oligarki atau sering disebut sebagai koalisi politik bisnis menjadi sebuah kepastian dan kenyataan dalam ekonomi politik di Asia hingga bahkan pada gelombang demokratisasi dipenghujung abad

dua puluh. Diskursus oligarki merupakan bagian dari kontekstual agenda kapitalisme – hingga berlanjut dalam agenda Neoliberalisme (Hadiz & Robison 2014). Bahkan Hadiz dan Robison menilai oligarki melakukan pembajakan agenda Neoliberalisme. Pada kenyataannya proses pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai operasi Neoliberalisme melibatkan campur tangan negara dan oligarki yang secara tidak langsung berkolaborasi dengan proyek tersebut. Sehingga ada baiknya penulis menjelaskan Neoliberalisme yang kemudian disusul penjelasan Oligarki sebuah kepastian yang ada dalam struktur ekonomi politik Indonesia.

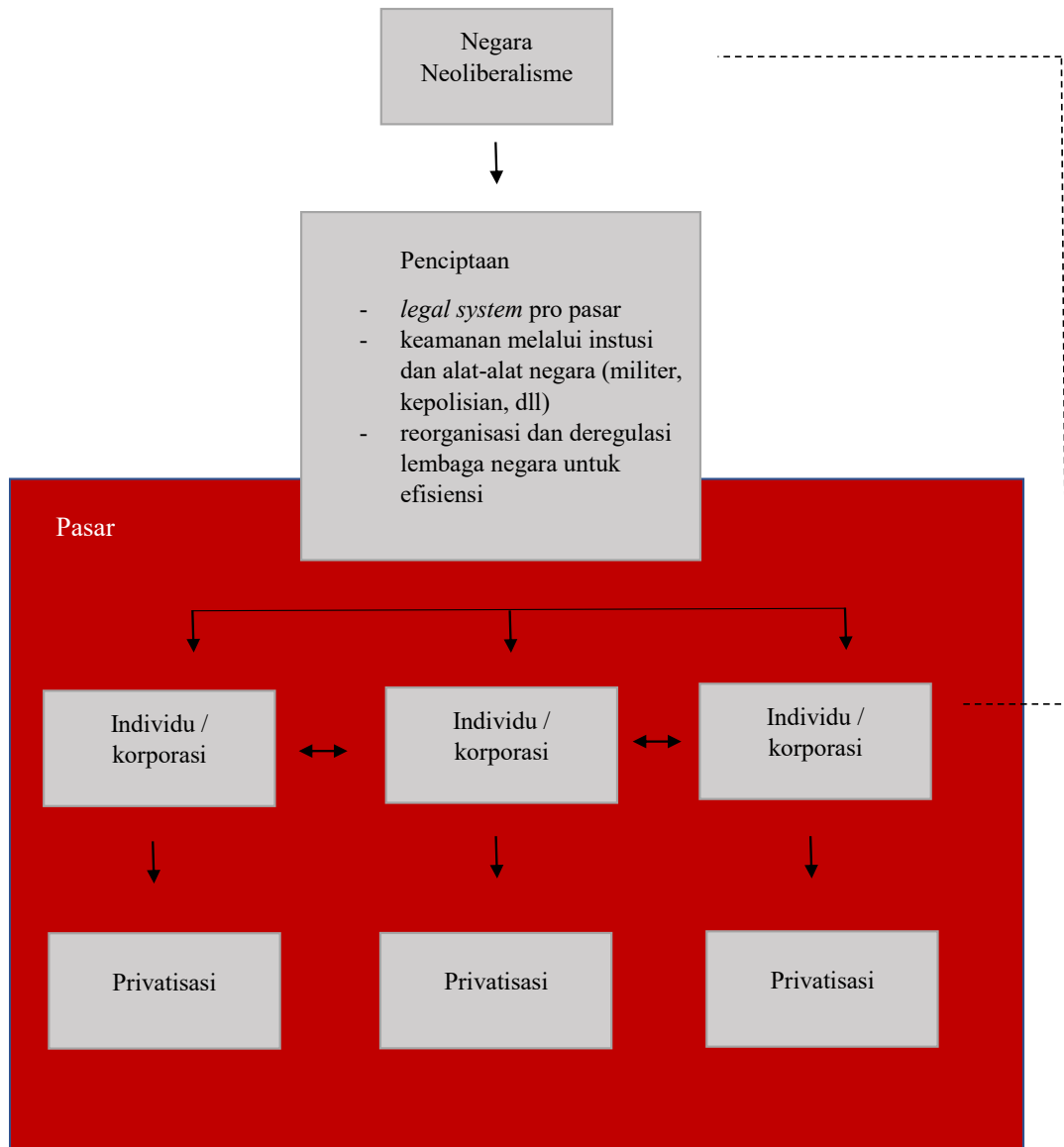
1.4.1.1 Kepastian Neoliberalisme: Sebuah Pengantar

Neoliberalisme secara teori adalah mengenai kestabilan ekonomi dan harmonisasi hubungan antar negara atau akan lebih terjamin oleh eksistensi kebebasan pasar yang didominasi kontrolnya oleh perusahaan multinasional, lembaga keuangan internasional atau swasta dengan didukung minimnya intervensi negara baik dalam bentuk kebijakan maupun instrumen lainnya yang melibatkan peran negara dalam pasar. Harvey menyebut Neoliberal harus berpihak pada individu, hak milik pribadi, institusi pasar, yang berfungsi dalam berjalannya pasar bebas (*free trade*). Sehingga Neoliberalisme menempatkan nilai sentral peradaban pada kemerdekaan setiap individu (Harvey 2005). Peran negara dalam agenda Neoliberalisme pada kekuasaan dalam perlindungan dengan memproduksi kerangka hukum (*Legal Framework*) dalam rangka memastikan kebebasan antar individu melakukan negosiasi dalam sistem pasar (Harvey 2005: 64).

Intelektual ekonomi penganut neoklasik F.A Hayek dalam beberapa tulisannya juga menegaskan kebebasan individu dan doktrin pasar bebas, menolak peran negara dan intervensinya. Bagi Hayek kebebasan sesungguhnya adalah kebebasan ekonomi tanpa kontrol pasar oleh negara. Namun dalam buku *A Brief History of Neoliberalism*, David Harvey menjelaskan secara rinci peran negara dalam praktik ekonomi politik di kerangka Neoliberalisme. Peran negara adalah

untuk menciptakan kerangka kerja institusional - memfasilitasi, seperti menjamin kualitas dan integrasi uang, mengatur fungsi aparat keamanan – disebut Harvey kepolisian dan militer – untuk menciptakan iklim yang aman, menciptakan hukum dan aturan yang mana tujuan dari semua kerangka kerja tersebut adalah mengamankan hak pribadi, menghindari kekerasan, dan pada akhirnya adalah menciptakan kondisi pasar yang aman (Harvey 2005:3).

Proyek Neoliberalisme menjadi agenda dominan dalam kehidupan ekonomi dan politik global. Dalam perkembangan Neoliberalisme terus melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk bertahan hidup dalam perkembangan ekonomi-politik di berbagai kawasan dunia. Neoliberalisme merupakan sebuah gejala universal yang dapat terjadi dan dapat “menjangkit” di berbagai tipe negara. Kebangkitan Neoliberalisme dilacak pula oleh Harvey pada malaise tahun 1970-an hingga di awal 1980 yang mana menjadi titik awal sejarah baru – Harvey bahkan menyebut sebagai awal revolusi- sosial, ekonomi, dan politik dunia. Dibawah Deng Xiaoping, China dibawa ke era liberalisasi ekonomi yang semula China dengan dapur pacu Komunis, menjadi negara yang terbuka dan sebagai perkembangan kapitalis terbuka dan ekspansif hingga kini karena permasalahan *overaccumulation* di dalam negaranya (Harvey 2005: 132). *Overaccumulation* yang dimaksud adalah pratanda malaise yang diikuti surplus kapital berupa modal maupun uang serta surplus tenaga kerja dimana dilanjutkan dengan ketidakmampuan menggunakan surplus yang ada (Harvey 2003: 86; 2006). Perluasan geografis merupakan pilihan tunggal disamping untuk memperpanjang umur dari kapitalisme sebelum lebih lanjut mengenai upaya kapitalisme yang pada ujung titik pada bentuk Neoliberalisme.



Bagan 1.2: Skema Hubungan Negara Neoliberal dengan sektor Privat
 Sumber: diolah penulis

Hal ini yang membuat Neoliberalisme secara disiplin mencari asset-asset publik untuk diprivatisasi. Kecenderungan individu-individu di dalam sistem pasar untuk melakukan eksploitasi sumber daya milik bersama seperti air dan tanah – ini terjadi hingga kini dan terjadi di negara-negara berkembang. Privatisasi dan deregulasi menjadi kombinasi selanjutnya bagi Neoliberalisme untuk menyelesaikan permasalahannya terakumulasinya nilai tambah kapitalisme di

dalam satu ruang atau lebih lanjut disebut *overaccumulation* (Harvey 2003; 2005: 67). Diklaim dapat menghilangkan birokrasi yang berlebih, meningkatkan efisiensi, dan berbiaya murah. Sehingga di negara-negara Neoliberalisme akan melakukan perampingan organisasi atau institusi negara guna meningkatkan efisiensi. Pada Bagan 1.2 menunjukkan kekhasan negara Neoliberal memberikan jaminan kerangka hukum dan jaminan keamanan dalam ekosistem pasar.

1.4.1.2 *Accumulation by dispossession*: Teori dan Tawarannya

Penjelasan teori *Accumulation by dispossession* merupakan bagian dari penjelasan “tidak utuh” dari Marx mengenai reproduksi sederhana dalam bukunya Das Kapital jilid II tentang sirkulasi kapital yang pada akhirnya membuat seorang Rosa Luxemburg memberikan penjelasan utuh – dalam karyanya yang dicetak ulang berjudul *accumulation of capital* (2003) Luxemburg menegaskan penjelasannya merupakan upaya untuk mengutuhkan penjelasan Marx mengenai reproduksi kapital. Dimana pada akhirnya memberikan inspirasi seorang Harvey menjelaskan secara “terang benderang” dengan kaca mata geografisnya mengenai Imperium nya. Sehingga nampaknya penulis akan menjelaskan - secara utuh pula- terlebih dahulu bagaimana penjelasan *accumulation by dispossession* dijelaskan secara teoritis dan konsep yang menyeluruh hingga nantinya dioperasionalkan dalam penelitian ini.

Luxemburg menemukan celah penjelasan Marx yang nampak tidak utuh sejak Marx menjelaskan mengenai proses sirkuit kapital. Sederhananya dalam menurut Marx ada tiga tahap dalam sirkuit kapital uang, tahap pertama kapitalis tampil di sistem pasar barang-dagang dalam tahap ini uang (kapital) diubah menjadi barang dagang; tahap kedua, dalam tahap ini merupakan tahap konsumsi tahap kapitalis atas barang dagang yang mereka beli ditahap pertama, proses ini bernama tahap produksi yang mana akan menghasilkan nilai barang lebih besar daripada nilai produksinya – tercipta laba; Tahap ketiga sang kapitalis kembali ke sistem pasar sebagai penjual, proses ini merupakan transformasi barang dagang menjadi uang (Marx 1956: 15). Sirkuit kapital uang ini membentuk ketegangan-ketegangan

diantara sang kapitalis, saling berlomba-lomba untuk mencapai tingkat nilai lebih tertinggi. Marx pun menekankan untuk menjaga proses sirkuit kapital yang dilakukan oleh sang kapital agar reproduksi kapitalis dapat terus berlangsung, dengan menjaga keseimbangan antar departemen – Marx membagi dalam dua departemen. Departemen I memproduksi sarana dan alat produksi, sedangkan Departemen II menghasilkan sarana produksi (Luxemburg 2003: 436).

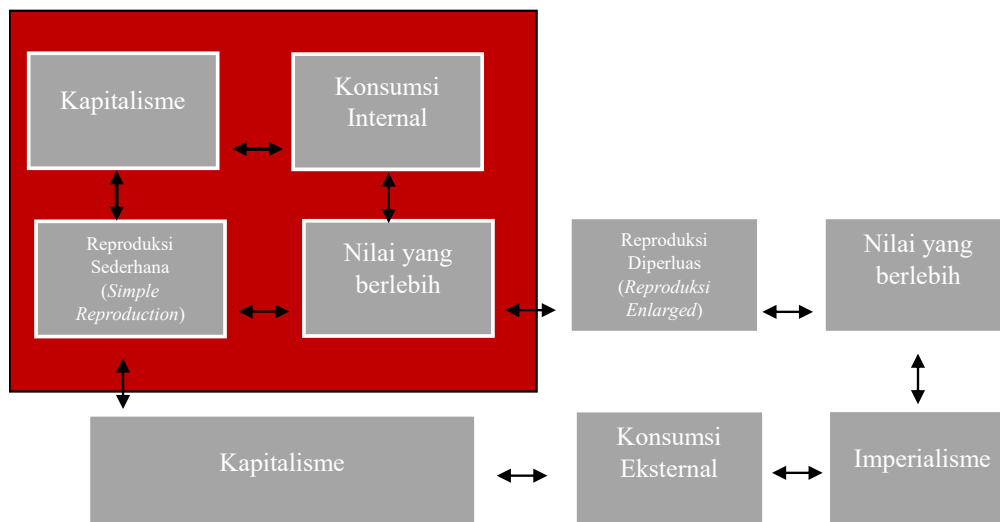
Pada bagian inilah Luxemburg mencoba memberikan kritik sekaligus melanjutkan penjelasan Marx yang tidak tuntas. Pertama, tidak adanya sarana atau proses untuk menciptakan barang menjadi uang sebagai bentuk murni dari kapital, yang ada hanya menciptakan nilai lebih atas barang dagang yang masuk dalam sistem pasar – harus menemukan nilai terjual dalam pasar. Kedua, pekerja yang akan menjadi “pembeli” atas produksi yang dia produksi karena nilai atas upah mereka tidak lebih dari apa yang mereka terima dari sang kapitalis, pekerja juga bagian dari bagian dari kapitalisme yang membuat akumulasi kapital tidak akan bertambah nilainya. Sang Kapital juga tidak menjual hasil produksi ke sesama kapital karena pada akhirnya akan sama-sama masuk ke dalam reproduksi sederhana, dalam sederhananya aliran kapitalisasi akan berjalan ditempat saja. Luxemburg berkesimpulan bahwa akumulasi dapat direalisasikan jika dibawa keluar wilayah kapitalis – yang berisi sang kapital dan pekerja – ke wilayah non kapitalis (Luxemburg 2003: 397) karena Luxemburg menjelaskan:

*.....political expression of the accumulation of capital in its
competitiv struggle for what remains still open of the noncapitalist
environment. (Luxemburg 2003: 426)*

Ke tidak tuntas Marx dalam menjelaskan akumulasi kapital adalah bagaimana dan siapa yang akan menyerap apabila barang dagang yang diproduksi terakumulasi dan mencapai titik maksimal? Disinilah kapitalisme membutuhkan wilayah – istilah yang digunakan Harvey nantinya sebagai teritorial- non kapital. Bagaimana Luxemburg mencontohkan apa yang terjadi di Jerman – seputaran awal tahun 1900 an - dimana telah beroperasinya perekonomian petani tradisional dengan perekonomian industri di Jerman yang memiliki hubungan secara ekonomi dalam

satu kerangka kapitalis, dapat diibaratkan pertanian Jerman sebagai wilayah non kapitalis (pasar eksternal) – dengan segala tradisionalnya – dan industri Jerman merupakan wilayah kapitalis yang di dalamnya terdapat sang kapital dan pekerja (Luxemburg 2003: 347).

Reproduksi yang diperluas pada akhirnya menjadi penjelasan sebuah perjalanan sejarah baru dari kapitalisme. Kapitalisme yang dibayangkan Marx mengenai reproduksi sederhana akan mematikan dirinya sendiri kala akumulasi nilai tambah pada titik maksimal, ekspansi dan perluasan wilayah seperti yang terjadi di Jerman menjadi pilihan. Hal itupun terjadi sangat natural, inilah yang bagi Luxemburg selanjutnya sebagai upaya Imperialisme. Berikut skema imperialisme yang berawal dari reproduksi diperluas – *enlarge reproduction*- hingga membentuk imperialistik:



Bagan 1.3 Skema Imperialisme Rosa Luxemburg
Sumber: diolah penulis

Dari Bagan 1.3 dapat dilihat wilayah merah menunjukkan penjelasan Marx dalam Das Kapital yang tidak tuntas dimana selanjutnya oleh Luxemburg dijelaskan dalam reproduksi diperluas. Kenyataan kesejarahan akumulasi primitif terus berjalan seiring dengan bertahan hidupnya kapitalisme secara involutif. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan kapitalisme mampu menyelesaikan permasalahan

nya sendiri yaitu akumulasi berlebih dalam reproduksi sederhanya. Imperialisme dan akumulasi primitif bukan merupakan bagian yang terpisah. Hubungan diantaranya merupakan hal yang menyejarah keduanya adalah penjelasan struktural akumulasi kapital.

At the time of primitive accumulation, i.e. at the end of the Middle Ages, when the history of capitalism in Europe began, and right into the nineteenth century, dispossessing the peasants in England and on the Continent was the most striking weapon in the large-scale transformation of means of production and labour power into capital. Yet capital in power performs the same task even to-day, and on an even more important scale—by modern colonial policy. It is an illusion to hope that capitalism will ever be content with the means of production which it can acquire by way of commodity exchange.
(Luxemburg 2003: 350)

Lantas apa yang dimaksud Luxemburg mengenai wilayah non kapital (Pasar eksternal)?, seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa kebutuhan mendesak wilayah non kapitalis karena terakumulasinya nilai tambah di dalam reproduksi sederhana yang tidak akan mampu melakukan perkembangan yang bersifat ekspansif. Surplus yang ada tidak memungkinkan untuk melakukan pertumbuhan ke dalam untuk menghasilkan nilai yang lebih. Luxemburg menjelaskan bahwa ada “yang harus dibayar tuntas” dalam perilaku kapitalisme imperialistik ini. Kapitalisme secara terus menerus dan secara progresif melakukan penghancuran atas sektor, wilayah non kapitalis dan organisasi non kapital. Hal ini sejalan dengan logika ekspansi kapital yang selalu diiringi oleh semangat ekspansif imperial dalam melawan ikatan-ikatan sosial yang diserap untuk profit – masyarakat wilayah non kapital. Secara rinci penyerapan profit kelas sang kapital dijelaskan oleh Luxemburg untuk melawan masyarakat di wilayah non kapitalis untuk bertujuan, pertama untuk segera memiliki sumber-sumber penting produktif seperti tanah, air, tumbuhan, dll; kedua melemahkan kekutan pekerja dan memaksakan menjadi pelayan kapital; ketiga memperkenalkan komoditas ekonomi; dan keempat, untuk

memisahkan (lebih partikular) komoditas perdagangan dan pertanian (Luxemburg 2003: 349).

Hal ini secara langsung menginspirasi rancang bangun pemikiran Harvey dalam buku *New Imperialism* (2003) Kapitalisme mampu bertahan hidup atas permasalahan *Overaccumulation*, atau Luxemburg menyebut sebagai nilai lebih yang terakumulasi. Penulis akan mendudukan argumen David Harvey pada teori *Spatial Temporary Fix*¹⁵, yang mana akan menjelaskan dua analisa sekaligus yaitu penciptaan ruang ekonomi (*Space Economy*) dan Akumulasi melalui penjarahan (*Accumulation by Dispossession*).

Penjelasan Imperialisme yang merupakan babak baru sejarah atas kapitalisme yang – kembali -tidak dituntaskan oleh Luxemburg – begitu juga Lenin. Harvey menawarkan teori *Spatial Temporary Fix*, hal ini didasarkan pada kenyataan kapitalisme bertahan hidup – melalui agenda pemanfaatan dan penciptaan ruang global (Harvey 2003: 97). Melalui perluasan ruang atau Harvey menyebut *Product of Space* kapitalisme mampu menemukan solusinya namun penuh kontradiksi (*its own contradictions*) yang akan menghancurkan dirinya sendiri (Harvey 2003: 98). Apa yang dimaksud disini merupakan reformulasi dari teori Marx mengenai tendensi kejatuhan nilai laba yang dibarengi dengan surplus kapital (berupa uang dan kapasitas produksi) serta surplus tenaga kerja, permasalahan berlanjut pada ketiadaan cara untuk menggunakan surplus tersebut secara menguntungkan – menghasilkan laba.

Spatial Temporary Fix menjelaskan atas dasar malaise – *its own contradictions* - yang terus terjadi tadi disetiap ruang hasil produksi kapitalis melalui operasi imperialistik, yaitu pengulangan surplus (dalam bentuk uang atau kapasitas produksi) di ruang-ruang yang di barengi dengan ketidakmampuan penggunaan surplus secara menguntungkan. Perluasan ruang merupakan solusi yang sementara sembari menunggu akumulasi surplus terjadi di ruang baru

¹⁵ Penulis penulis tidak akan mendalami membahas *spatial temporary fix* karena bagian utuh dari kajian Imperialisme yang diajukan oleh Harvey, namun akan menjelaskan agar menjadi sebuah keutuhan dalam menjelaskan argument *Accumulation by Dispossession*.

tersebut. Harvey menyebutkan ada tiga upaya penyerapan surplus kapital dalam suatu ruang: pertama, pengalihan (temporal) dalam bentuk proyek investasi jangka panjang/belanja sosial seperti pendidikan dan kesehatan; kedua, pengalihan spasial melalui pembukaan pasar-pasar baru, sumber daya baru, tenaga kerja baru; dan ketiga, kombinasi ketiganya. Melalui analisis ini juga Harvey menjelaskan peran negara dalam operasi yang imperialistik. Aktivitas kapitalistik lebih menyukai institusi dan organisasi pasar memiliki keterjaminan secara hukum dan regulasi negara¹⁶ untuk menghindari terjadinya konflik kelas (Harvey 2003: 101 & 103). Hal ini juga untuk menciptakan “suasana pasar” nir atas kepentingan pemburu rente dan kepentingan antar pedagang.

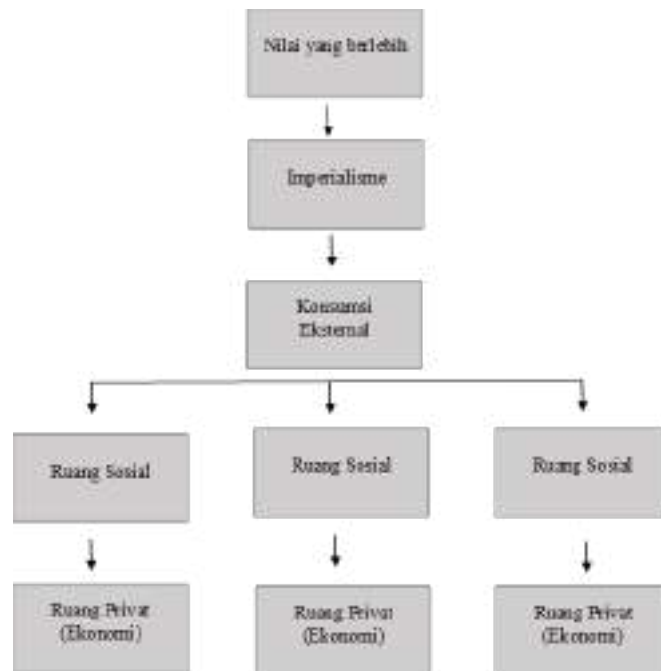
Akumulasi kapital merupakan suatu proses yang natural berifat ekonomi dimana momen terpentingnya adalah transaksi antara sang kapitalis dengan buruh upah (Harvey 2003: 138) dalam proses inilah – yang diharapkan – terjadinya kesetaraan, kedamaian, dan pengakuan hak milik namun seiring berjalannya relasi tersebut, akumulasi terjadi yang justru menciptakan pengambil alihan paksa, eksploitasi buruh dan terbentuknya kekuasaan berdasarkan kelas. Bukan hanya dari melakukan akumulasi modal saja dengan metode perampasan, kapitalis melakukan akumulasi dengan modus-modus produksi non kapitalis seperti kebijakan khas kolonial dan sistem universal seperti hutang internasional (Harvey 2006: 398). Sehingga yang terjadi hingga hari ini akumulasi kapitalisme masih menggunakan metode dan fitur-fitur yang sama primitifnya. Penjarahan tanah masyarakat asli dan alamnya oleh perusahaan dan atau yang disponsori oleh negara, privatisasi perusahaan nasional, Harvey menyebutnya sebagai akumulasi lewat penjarahan (*accumulation by dispossession*). Sebenarnya Harvey mencoba mengembangkan konsep Marx tentang *primitive accumulation* melalui penjelasan Luxemburg merupakan asal-muasal surplus dimana fase pertama dalam akumulasi kapital adalah memisahkan produsen dari alat produksi. Harvey menjelaskan *accumulation by dispossession* merupakan suatu proses natural yang bersifat – bermuat- ekonomi

¹⁶ Harvey secara rinci menjelaskan – yang juga diilhami oleh Luxemburg – peran negara sebagai fasilitator kapitalis melalui kekuatan militer dan kekerasan, baca *accumulation of capital* (2003)

fase terpentingnya ialah transaksi antar sang pemodal dan buruh upah. Tujuan yang semula berupa pengakuan hak milik dan kesetaraan dalam proses-proses beroperasinya menjadi perampasan, eksploitasi kaum pekerja yang berujung pada kekuasaan kelas (Harvey 2003). *Accumulation by dispossession* merupakan bagian dari cara bertahan hidup sang kapitalis, dengan melakukan perjualasan secara teritorial ke wilayah-wilayah yang belum terjamah kapital. Hal ini menurut Harvey merupakan solusi atas permasalahan *overaccumulation* di wilayah-wilayah kapital.

Proses *accumulation by dispossession* merupakan proses yang menyebarkan. Harvey dengan argumen mengenai historis geografisnya memberikan catatan mengenai bagaimana terjadinya *accumulation by dispossession* adalah terbukanya ruang-ruang baru melalui privatisasi dan komodifikasi tanah dengan cara mengubah berbagai bentuk hak milik Bersama atau kolektif – hak milik negara-menjadi hak milik privat atau pribadi. Praktek ini merupakan pemisahan hak milik penduduk atau petani dengan properti nya dalam hal ini tanah sehingga menciptakan “secara paksa” petani yang tak bertanah (Harvey 2003: 162). Harvey melihat bahwa logika ekspansif kapital yang melakukan transformasi ruang-ruang sosial menjadi ruang privat masih eksis di dalam geografi historis kapitalisme hingga kini.

Sebagai contoh setidaknya dibukanya ekonomi -Cina dan Uni soviet disebutkan oleh Harvey dibuku *New Imperialism...* membuat penguasaan aset-aset kapital terjadi dan menggiring ke arus kapital global. – Harvey menyebut sebagai sirkuit kapital. Maka pertama proyek privatisasi aset-aset dan ruang sosial menjadi amat berarti bagi agenda Neoliberalisme yang nantinya pada penjarahan kaum marjinal, Harvey melihat proses *accumulation by dispossession* sebagai proses ploretarianisasi. Proses ploretarianisasi merupakan proses kombinasi apropriasi dan koersi (Harvey 2003). Dimana kombinasi atas relasi-relasi sosial, pengetahuan, kebiasaan, dan hingga kepercayaan pihak yang diploretarianisasikan dimasyarakat prakapitali, melalui struktur kekerabatan, tatanan keluarga dibangun melalui agama dan institusi yang menyertainya.



Bagan 1.4 Skema *Accumulation by Dispossession* dalam Perampasan Ruang Sosial
Sumber: diolah penulis

Struktur ini harus direpresi guna menciptakan buruh kapitalisme, disinilah *acvumulation by dispossession* membutuhkan apropriasi dan kooptasi untuk menjangkau dan melakukan *supersession* di sosial kultural masyarakat.

1.4.1.3 Neoliberalisme di Asia dan upaya bertahan hidup

Pertumbuhan ekonomi menjadi bagian rancang bangun ekonomi Indonesia setidaknya di Orde Baru, pertumbuhan kapitalisme praktis berkembang sekalipun Orde Baru runtuh. Sebelumnya bagi kalangan Neoliberal dan begitu juga dengan pengkritiknya, Marxian, kapitalisme di Asia yang demikian merupakan buntut dari proses industrialisasi terlambat yang terjadi di Asia, dalam keadaan demikian negara memiliki peran sentral dan masih dibutuhkan sebagai wakil dan pelindung *civil society*, masyarakat kelas menengah, hingga kalangan borjuasi karena dalam proses ini mereka masih dalam masa inkubasi (Hadiz 2005: 105). Alice H. Amsden berpendapat lain mengenai ini dalam tulisannya *Third World Industrialization: 'Global Fordism' Or A New Model?* (1990), kapitalisme Asia bukan pada masa

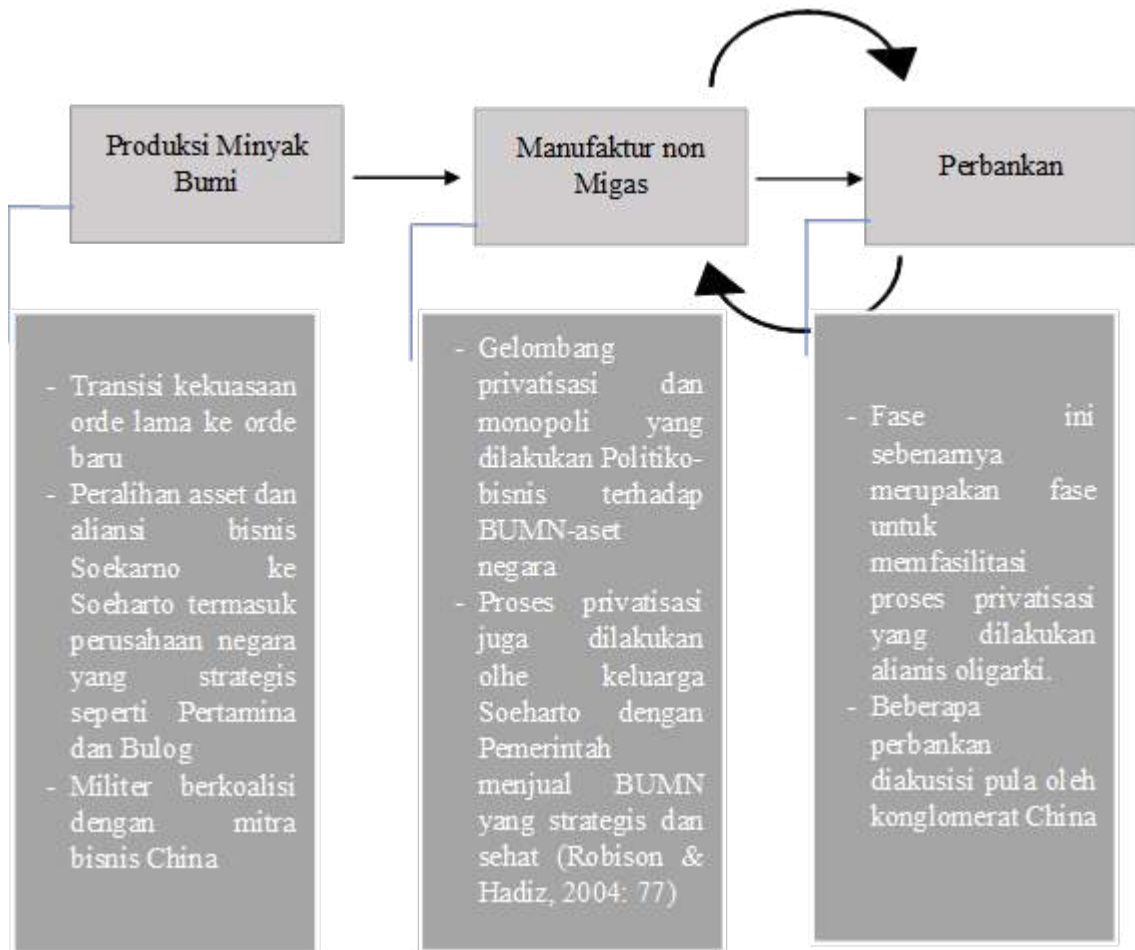
transisi maupun sebuah “momen” peralihan namun kapitalisme Asia merupakan bentuk dari kapitalisme itu sendiri. Hal itu didasarkan pada pola kekuasaan yang mana mengedepankan supremasi negara dengan kepemimpinan yang tersentral sebagai dasar dalam membentuk negara industri, ini mengacu pada semangat kolektifitas masyarakat dibanding membentuk masyarakat berbasis demokrasi liberal yang mengedepankan kebebasan privat. Malaise di Asia diawal 1990-an hingga akhir 1998 menjadi peristiwa penting bagaimana perdebatan mengenai format ekonomi politik Asia dalam menerima dan merespon ekonomi pasar yang menjadi sebuah kepastian.

Hadiz mempercayai bahwa malaise Asia disebabkan oleh kegagalan evolusi pasar yang ditengarai oleh negara melalui mekanisme abstrak yang digerakan oleh hukum efisiensi internal dan universal yang secara terus menerus diganggu oleh aliansi politiko-bisnis yang menguasai ruang politik dan negara. (Hadiz 2005: 110). Hal ini yang membuat Hadiz menilai keberadaan koalisi pemburu rente merepotkan agenda kapitalisme pasca otoritarian. Dimana prinsip pasar yang mengedepankan efisiensi dan – hampir – menirkan peran negara di ruang-ruang ekonomi. Begitu juga menjadi dasar kalangan ahli ekonomi neoliberal melihat pengalaman negara-negara Asia merespon dari kepastian masuknya sistem pasar di negara Asia. Efisiensi dan pengorganisasian yang rapi dalam mengelola lembaga-lembaga negara serta peran negara sebagai intrumen memfasilitasi pasar tentu menjadi resep dan pedoman dari ekonomi pasar namun nyatanya, format ekonomi politik Asia mengharuskan negara berperan sentral tak terlekan. Individ-individu – privat – yang semula menjadi “penunjang” fasilitas dari ekonomi pasar secara ironis dan tidak terelakan harus menyertakan negara. Robison juga secara khusus dalam tulisannya *Neo-liberalism and the Market State: What is the Ideal Shell* dalam *The Neo-Liberal Revolution: Forging the Market* (2006) dimana neoliberal merupakan proyek global yang tidak terelakan penetrasinya ke dalam negara-negara di dunia. Robison memberikan contoh pengalaman Chili dengan sekelompok teknokrat ekonom yang dijuluki *Chicago Boy* yang masuk dalam formasi kementerian berhasil melakukan penetrasi kebijakan – dalam keputusan politik- khas Neoliberal, di Indonesia pola sama terjadi dengan julukan *Berkeley mafia* masuk ke format

kementerian di era Orde Baru. Bagi Robison, Negara digunakan kepentingan “mereka” – jaringan kapital nasional maupun global (Robison 2006: 18).

1.4.1.4 Teori Oligarki: Sebuah Tinjauan

Respon atas perkembangan kapitalisme di Indonesia sudah dikemukakan oleh Richard Robison dalam bukunya *Indonesia: the Rise of Capital* (2009) mengenai beroperasinya kapitalisme sejak dimasa-masa orde lama hingga berkembang pesat di Orde Baru yang didukung momentum transisi pengalihan pendapatan negara dari sektor produksi minyak bumi – *oil bomb* – di tahun 1980-an menjadi industri berbasis manufaktur *non oil* sehingga berkembangnya kelompok-kelompok borjuasi – pembisnis- dalam akumulasi kapital. Celakanya ini didukung oleh negara melalui institusi dan aparaturnya di Orde Baru. Hubungan yang terbentuk di era Orde Baru merupakan khas Negara patrimonial dimana Orde Baru bukan menjadi inkubator kelas kapitalis namun menjadi inkubator koalisi politiko-bisnis. Setidaknya ada tiga fase penting bagaimana Orde Baru “mengatur” aliansi koalisi politiko-bisnis, pertama, fase transisi perubahan produksi ekonomi negara dari industri minyak bumi di tahun 1980-an terjadi penurunan produksi minyak dan gas yang berakibat pada penurunan nilai ekspor; kedua, fase peralihan ekonomi negara dari semula minyak dan gas menjadi industri manufaktur non migas, serta fase ketiga adalah ekspansi negara melalui aliansi oligarki – dan keluarga Soeharto – dibidang perbankan hingga menjelang berakhirnya Orde Baru di tahun 1997 an (Robison & Hadiz 2004: 29).



*Bagan 1.5 Tiga Fase Inkubasi Kapitalisme "Oligarki" di Era Orde Baru
Sumber: diolah penulis*

Pada fase kedua, kapitalisasi yang terjadi di era Orde Baru menempatkan aliansi oligarki pada pemain utama dalam proses privatisasi dan monopoli ekonomi yang di pimpin oleh Soeharto. Aset-aset negara dan BUMN-BUMN dijual oleh pemerintah kepada aliansi oligarki dan jaringan-jaringan Soeharto dengan harga murah. Kesuksesan privatisasi besar-besaran karena pemerintah di tahun 1980-an menderegulasi peraturan perdagangan, melonggarkan pembatasan investasi asing dan tidak menutup kemungkinan membuka berbagai monopoli negara untuk investasi sektor swasta, serta – atas perintah Soeharto ke teknokrat ekonominya – turut memfasilitasi dengan memberikan kredit murah melalui mekanisme peminjaman di bank-bank negara – Bank Bapindo dan Bank Bumi. Setidaknya dalam kurun waktu 1980-1990 an perkembangan di industri manufaktur ekspor

dengan upah pekerja murah – seperti sepatu, elektronik, dan tekstil meningkat¹⁷. Namun hal ini membentuk kekuatan monopoli yang dilakukan oleh koalisi yang terbentuk dan berjejaring dengan keluarga Soeharto. Seperti monopoli produksi bahan input manufaktur produk plastik, timah, dan baja yang mana produsen dan pengusaha memiliki jejaring dengan Soeharto atau minimal berjejaring dengan keluarga Cendana. Bukan tidak berasal pasca *oil bomb* Soeharto dan aliansi politiko-bisnisnya berhasil memusatkan diri dari sektor-sektor yang sesungguhnya rentan dengan restrukturisasi – desakan global – seperti industri berbasis sumber daya, industri infrastruktur (Robison & Hadiz 2004: 73).

Di fase ketiga, yang semula mendominasi dan memonopoli industri manufaktur. Aliansi politiko bisnis bergerak ke sektor perbankan dan sektor pembiayaan. Hal ini merupakan kesempatan baru bagi aliansi ini untuk menemukan peluang yang menguntungkan sebagai mitra dalam konsosium yang mencakup bank asing dan konglomerat. Pada fase ini juga para oligarki – jaringannya – melakukan perluasan dengan memanfaatkan akses kemitraan antara politiko-bisnis, konglomerat besar China dan investor asing. Oligarki memiliki kemampuan melakukan pinjaman komersial yang diatur dan ekuitas dipasar modal sebagai sumber utama pertumbuhan perusahaan para oligarki (Robison & Hadiz 2004: 73) sehingga pada fase ini merupakan fase oligarki melakukan isolasi diri dan mendiversifikasi kerajaan bisnis dengan memperluas bagian-bagian kerjaan bisnis oligarki diluar negeri (Robison & Hadiz 2004 serta Robison 2009).

Robison dan Hadiz menyimpulkan bahwa kepentingan dan aliansi yang berhasil terkonsolidasi di bawah inkubasi kapitalisme Soeharto yang telah mengakar akan berusaha untuk melestarikan pengaturan dimana hegemoni mereka tanamkan dalam hal ini adalah modal (Robison & Hadiz 2004: 5).

¹⁷ Biasanya merupakan perusahaan-perusahaan asing dari negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea.

Selain Robison dan Hadiz, kajian oligarki juga dikaitkan dengan Jeffrey Winters dalam karya nya berjudul *Oligarchy*¹⁸. Kedua nya juga menekankan keunggulan sumber dayan material sebagai kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi. Walaupun ada perbedaan yang tajam dalam mendefinisikan oligarki hal ini konsekuensi dari pendektana teoritis dari keduanya. Hal ini berpengaruh bagaimana keduanya mengoperasionalkan konsep pertahanan kekayaan. Meskipun Winters maupun Robison dan Hadiz sama-sama berangkat pada konsep kunci pertahanan kekayaan (*Wealth Defense*) dalam menjelaskan oligarki (Winters 2011 dan Robison & Haidz 2004). Namun berimbas dalam mendefinisikan oligarki sebagai *Wealth Defense* melalui aktor material yang melimpah. Winters menjelaskan perilaku oligark yang terkadang berperilaku komunal dan terkadang berperilaku individu. Perbedaan bentuk oligark ditentukan oleh bentuk ancaman dan keuntungan yang diperoleh oleh oligark untuk mempertahankan kekayaanya. Perilaku tersebut bagi Winters karena adanya satu pola konsisten dalam sejarah manusia mengenai mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan yang sebesar-besarnya ditangan kelompok minoritas – cenderung amat kecil (Winters 2011: 31). Tesis Winters ini dalam kacamata Indonesia didasarkan pada analisisnya mengenai pemanfaatan politik elektoral oleh oligark untuk mempertahankan kekuasaanya dengan memilih dan mendukung pendanaan elite politik dalam kontestasi elektoral¹⁹.

Hal yang berbeda diungkapkan Robison dan Hadiz, apabila Winters fokus pada agensi, Robison dan Hadiz menjelaskan sistem relasi kekuasaan kolektif yang terjadi di Indonesia. Menguatnya hubungan negara bonapartis yang ditandai dengan adanya perpaduan akumulasi kekayaan dan kekuasaan para oligark dan negara. Lebih lanjut Robison dan Hadiz dalam karyanya *Reorganising power...*²⁰ definisi

¹⁸ Lihat Jeffrey Winters, *Oligarchy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004)

¹⁹ Dalam kuliah umum Jeffrey Winters bertema *Oligarchy and The Jokowi Administration* pada 12 Juni 2015 di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.

²⁰ Sebenarnya ada beberapa karya lain dari Hadiz yang jelaskan Oligarki namun di dalam buku *reorganising Power...* Robison dan Hadiz secara sistematis menjelaskan oligarki dalam konteks Indonesia dapat juga dilihat karya Vedi Hadiz di bukunya *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto* (2005)

oligarki didasarkan pada perkembangan kapitalisme yang sudah terjadi di masa Orde Baru. Perkembangan ekonomi pasar di Indonesia merupakan hasil dari perjuangan akumulasi kekayaan pribadi dan atau koorperasi. Melalui saluran-saluran negara dalam hal ini institusi publik dan otoritas negara, Fenomena ini digambarkan sebagai “akumulasi primitif” atau “kapitalisme politik” (Hadiz & Robison 2014). Analisa oligarki tidak bisa disekat dengan rezim-rezim tertentu karena nyatanya oligarki berhasil bertahan dan melakukan penyesuaian. Memang malaise ekonomi 1997 memnuat aliansi Oligarki “*Shock*” namun dapat bertahan karena “kepentingan yang agresif”. Kelompok-kelompok bisnis dalam hal ini perusahaan-perusahaan – Oligarki – menolak untuk membayar hutang mereka serta berhasil menyelamatkan aset-aset mereka dari kebangkrutan karena putusan pengadilan karena Oligarki beraliansi dengan parlemen untuk mengamankan mereka.

Most of Indonesia's corporate moguls were able to retain many of their assets by refusing to surrender assets in settlement of bank debts and, together with nationalist allies in parliament, holding up the asset disposal process (IMF 2002: 28–50) Such action was logical where the costs could be transferred to the state and where government had proven unable to enforce bankruptcy in the courts. (Robison & Haidz 2004: 264)

Contoh lainnya rezim demokrasi pasca Soeharto, Hadiz secara detail di bukunya “Dinamika kekuasaan...” runtuhnya Orde Baru memang membuat oligarki harus melakukan penyesuaian-penyesuaian kelembagaan. Melalui saluran desentralisasi oligarki berhasil “mengendarai” ke daerah-daerah – lokal. Oligarki disini ialah sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan adanya konsentrasi kekayaan dan otoritas serta perlindungan kolektif di keduanya (Hadiz & Robison 2014: 37). Sehingga penjelasan oligarki harus dijelaskan secara historis mengingat perkembangan oligarki Indonesia berbeda dari hasil perbandingan yang dilakukan Robison dan Hadiz, seperti perkembangan kapitalime Indonesia ditumbuh kembangkan dalam proses-proses internal negara dan secara spesifik kelompok

kecil – minoritas – yang terlibat dalam proses itu yaitu etnis Tionghoa dengan konsekuensi ruang politik dibatasi oleh negara kala itu namun proses inkubasi kapital berhasil memproduksi perkembangan kapitalisme antara pengusaha China dengan negara (Robison, 2009).

Tabel 1.1: Tabel Perbandingan Oligarki

	Perbandingan “Oligarki”	
	Jeffrey Winters	Richard Robison & Vedi Hadiz
Definisi	Politik pertahanan antar aktor ekonomi dan politik yang sama-sama memiliki kekayaan (<i>capital</i>), serta para oligark memiliki kecenderungan mempertahankan ketimpangan kekayaan yang ekstrim	sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan adanya konsentrasi kekayaan dan otoritas serta perlindungan kolektif di keduanya yang sering disebut sebagai predatoris.
Unit analisis	Karena oligarki adalah gejala umum, maka Jeffrey melakukan komparasi di beberapa negara.	Historis mengenai perkembangan kapitalisme di Orde Baru hingga pasca otoritarian
Skala (<i>scope</i>) Oligarki	Karena melakukan perbandingan antar negara, kajian yang dikembangkan skalanya lebih pada oligarki yang terjadi di Nasional	Hadiz lebih spesifik membahas di buku “Dinamika Kekuasaan...” mengenai perkembangan oligarki didaerah pasca Soeharto. Sehingga kajian yang dikembangkan pada bagaimana beroperasinya oligarki dari nasional ke tingkat lokal melalui kanal desentralisasi.

Sumber: diolah penulis

Hadiz dalam karyanya “Dinamika politik...” menjelaskan desentralisasi membuat relasi oligarki tersebar ke tingkat lokal tanpa mengubah bangunan oligarki itu sendiri, para oligark berhasil melakukan koalisi dengan negara dalam hal ini pemerintah daerah. Konsekuensi dari relasi tersebut adalah bentuk negara berkomposisi kekayaan dan kekuasaan politiko-birokratis yang tergambar dalam kepemilikan dan penguasaan modal ditingkat lokal. Hadiz dalam karyanya “Dinamika politik...” menjelaskan desentralisasi membuat para oligark tersebar ke tingkat lokal tanpa mengubah bangunan oligarki itu sendiri, para oligark berhasil melakukan koalisi dengan negara dalam hal ini pemerintah daerah. Konsekuensi dari relasi tersebut adalah bentuk negara berkomposisi kekayaan dan kekuasaan politiko-birokratis yang tergambar dalam kepemilikan dan penguasaan modal ditingkat lokal.

1.4.1.5 Neoliberalisme – Oligarki Indonesia dan Celah Perdebatannya

Neoliberalisme hingga kini menjadi wajah ekonomi politik dunia. Kemampuan Neoliberalisme menemukan solusi atas permasalahannya yaitu *overaccumulation* di wilayah kapital dengan melakukan *accumulation by dispossession* dalam dialektika histori geografi yang diajukan oleh Harvey. Beberapa catatan penting bagaimana teori *accumulation by dispossession* mampu menjelaskan perluasan Neoliberalisme secara spasial untuk memenuhi kebutuhan dan permasalahannya, yaitu *Overaccumulation* (Harvey 2003). Perluasan ruang ekonomi menjadi alternatif paling rasional dengan terjadinya perampasan ruang-ruang sosial yaitu privatisasi, penguasaan aset-aset publik seperti air dan tanah. Hal ini membuat apa yang digambarkan mengenai pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi pada sisi gelapnya adalah pasar yang eksklusif. Harvey menaruh sebuah ruang diskusi besar dalam kajiannya mengenai *Spatial Temporary Fix* – awal dari *accumulation by dispossession* - yaitu mengenai negara dan antisipasi kapitalistik dalam menciptakan monopoli – setidaknya oligopoli menggunakan ruang sebagai jalan keluar menghadapi *overaccumulation*. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang merupakan proyek *joint venture*

antara Indonesia dan China memperlihatkan bagaimana praktek dan “gerak” agenda Neoliberalisme di Indonesia.

Pengalaman ekonomi Indonesia pasca otoritarian mengubah operasi oligarki dalam lingkungan ekonomi politik yang lebih luas, yaitu Neoliberalisme Indonesia. Pembangunan kereta cepat yang diharapkan menumbuhkan kawasan atas kejenuhan kapital – dalam hal ini akumulasi kapital Jakarta dan Bandung yang mulai jenuh dan cenderung *high cost* – merupakan kenyataan perluasan wilayah di antara Kota Jakarta dan Kota Bandung. Penelitian ini melanjutkan kajian dan perdebatan yang dibangun Robison dan Hadiz mengenai oligarki Indonesia yang melihat sebagai dalang atas pembajakan agenda Neoliberalisme di Indonesia.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Beberapa kerangka konsep diperlukan untuk membantu penulis mengoperasionalkan teori, konsep yang diperlukan meliputi: Oligarki, Pertahanan kekayaan (*Wealth Defense*), Ekonomi Ruang (*Space Economy*), dan Kapitalisme.

1.4.2.1 Oligarki

Definisi oligarki sebagai sebuah kerangka konsep diperlukan. Apa yang disebutkan Karl Marx mengenai bourjuasi kapitalis berpusat pada kekuasaan – para oligark – menggunakan kekuasaan material di bidang ekonomi untuk mempengaruhi dan memberikan dampak di bidang sosial dan politik. Sehingga oligarki bagi Winters tidak selalu terkait dengan kapitalis, konsep oligarki adalah bagaimana konsentrasi pada kekuasaan pelaku menggunakan sumber daya material di bidang politik dengan efek menambah dan mempertahankan di bidang ekonomi – *economy effect*. (Winters 2011: 13).

Hal ini dijelaskan pula dalam tesis yang di ajukan dalam *reorganising power...* oleh Robison dan Hadiz mengenai oligark mampu bertahan dengan situasi perubahan kelembagaan. Dengan berfokus pada relasi negara dan borjuasi, Robison

dan Hadiz tanpa meninggalkan kerangka utama analisa Marxis mengenai kekuasaan kelas pemilik mengisyaratkan bahwa oligarki mampu melakukan penekanan bukan hanya pada bidang ekonomi saja namun pada bidang politik dengan sponsor utama negara. Melalui analisa relasi Hadiz lebih lanjut menjelaskan kelompok borjuasi dengan aparat negara maupun otoritas publik yang memiliki tujuan ekonomi dan kekayaan diri sendiri disebut sebagai predatoris (Hadiz 2005). Relasi itu terlacak ketika era Soeharto dan pasca Soeharto mengalami perubahan bentuk relasi dan cakupan (*Scope*) dengan tetap latarbelakang ekonomi politik neoliberal.

1.4.2.2 Pertahanan Kekayaan (*Wealth Defense*)

Analisa oligarki dan begitu juga oligark di dalamnya menggunakan kerangka Marxis. Melalui penjelasan kepemilikan produksi, kekuasaan kelas pemilik, dan penanaman modal, produsen mengambil surplus dari investasi tersebut (Winters, 2011: 14). Kendali atas kapital menjadi akar penedekatan materialis terhadap oligarki. Disini lah posisi Winters menjelaskan ketimpangan antara pemilik modal yang ekstrim akibat akumulasi kapital, konsekuensi dari ketimpangan dan akumulasi kapital dan begitu juga akumulasi kekuasaan mustahil tidak ada prasarana memepertahankan yang ada, mempertahankan kekayaan (*Wealth Defense*). Konsep pertahanan kekayaan (*Wealth Defense*) didasarkan pada konteks oligarki bertahan dan menyesuaikan struktur yang ekonomi politik nya. Analisa Winters yang didasarkan pada ketimpangan kekayaan yang ekstrem membuat oligark cenderung – dan pasti – berperilaku mempertahankan kekayaannya. Sedangkan dengan pengamatan yang sama mengenai konsep pertahanan kekayaan (*Wealth Defense*) Robison dan Hadiz menjelaskan secara tersirat dengan menggunakan kerangka pendekatan ekonomi politik struktural.²¹ Dengan tidak meloloskan kenyataan “persetujuan politik Indonesia” yang mengiringi dan mendahului demokratisasi dan proses ekonomi pasar di Indoensia.

²¹ Lihat *reorganising power...*

Dengan kemunculan lembaga-lembaga demokratis dan sistem ekonomi pasar – atau dikatakan oleh Hadiz sebagai ekonomi liberal – justru meneguhkan posisi elite sebelumnya yang tercerai berai seiring reformasi dan diikuti desentralisasi (Robison & Hadiz: 2004). Robison dan Hadiz menegaskan perubahan relasi kekuasaan antara negara dan kelompok oligarki untuk satu tujuan, mempertahankan posisi oligark itu sendiri, dengan harus menemukan cara baru “bertahan hidup” dan bergerak menyesuaikan keinginan pasar, disisi lain desentralisasi yang dilengkapi dengan politik elektoral benar-benar membuat oligark masuk dan menyesuaikan struktur yang ada pasca Soeharto dengan tujuan mempertahankan kekayaan (*Wealth Defense*).

1.4.2.3 Ekonomi Ruang (*Space Economy*)

Implikasi dari akumulasi kapital adalah munculnya ruang-ruang ekonomi. Konsep dasar dari *space economy* adalah dalam tradisi peradaban manusia mengenai kegiatan pertukaran barang dan jasa selalu menimbulkan perubahan dalam lokasi Harvey menyebutnya sebagai gerak spasial. Dalam aktivitasnya gerak spasial terhambat pada jarak yang mana aktivitas-aktivitas ekonomi sudah terjadi telah meruang. Hal ini dapat dicontohkan seperti perbedaan antara desa dan perkotaan yang memiliki perbedaan mecolok (Harvey 2003 & 2005). Sehingga *Space economy* tercipta atas aktivitas manusia yang mesejarah. *Space economy* tercipta karena aktivitas dengan logika dasar ekspansionis – kapitalisme – dalam upaya menciptakan akumulasi kapital dalam ruang dan waktu yang tiada henti.

1.4.2.4 Kapitalisme

Istilah kapitalisme berkembang bukan sebagai sebuah teori maupun pemikiran. Bahkan Marx dan Engels tidak menggunakan istilah kapitalisme untuk menyebut istilah yang sama namun menggunakan istilah “mode produksi kapitalis” atau “ekonomi borjuasi”. Menurut Claude Jessua melacak istilah kapitalisme mempunyai pengertian khusus sejak abad XVIII kata kapitalis

dipergunakan untuk memberikan istilah bagi pemilik modal, seperti Adam Smith (1723-1790) dari Inggris dan Turgot (1727-1781) dari Prancis seorang fisiokrat yang dalam beberapa gagasannya menyebutkan istilah kapitalis sebagai seorang pengusaha pertanian atau kapitalis industri (Jessua, 2011: vii dan Plekhanov 2005: 39). Jessua lebih lanjut dalam judul asli karyanya *Que Sais-Je Capitalisme* (2011) mendefinisikan kapitalisme merupakan sistem sosial ekonomi dengan para kapitalis sebagai aktor dominan, dipahami sebagai pengusaha yang memiliki modal untuk menjalankan perusahaannya sendiri (Jessua, 2011: 2) definisi ini berimbas pada pemisahan dan ketimpangan yang luar biasa antara pengusaha yang memiliki modal (modal) dengan para buruh (pekerja) yang hanya memiliki tenaga saja.

Dari identifikasi konsep kapitalisme penulis mencoba menyesuaikan konteks pengalaman Indonesia untuk menyamakan pemahaman kapitalisme itu sendiri. Hadiz (2005) mengawali tulisannya di “Dinamika Kekuasaan...” sudah memberikan gambaran kapitalisme Indonesia dalam kondisi “Industrialisasi terlambat” yang mana peran negara dibutuhkan dalam bidang ekonomi. Hal ini selanjutnya menjadi awal Hadiz – begitu juga Robison – dalam menjelaskan kemunculan predatoris. Namun dari beberapa identifikasi kapitalisme penulis berkesimpulan bahwa konteks kapitalisme Indonesia terjadi di era Orde Baru dengan berkembang bersama korps birokrat-politik, swasta bersama-sama mengembangkan kapitalisme “khas Indonesia”.

Sedangkan Harvey dalam memandang Kapitalisme bahwasanya memiliki varian terbaru yaitu Neoliberalisme (Harvey 2003: 112). Dengan logika dasar ekspansionis, kapitalisme merupakan sejarah penghancuran berbasis pengulangan guna mendapatkan laba yang tiada henti, melalui memfasilitasi aktivitas-aktivitas dalam ruang dan waktu lalu dan dihancurkan, dan terus melakukan pengulangan - tentunya untuk mencari nilai laba yang lebih tinggi melalui perluasan.

1.5 Metodologi dan Prosedur Penelitian

1.5.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara berfikir kritis (*critical thinking*). *Critical thinking* berangkat dari serangkaian kritik terhadap pemikiran dan tradisi filsafat yang telah berkembang sebelumnya. *Critical thinking* mengambil peran pada basis dialektis sebagaimana metode yang ingin diterapkan dan dibangun dalam memahami fenomena sosial (Jay, Martin 2005: 61). Dalam memahami realitas sosial, teori kritis nantinya tidak ingin terjebak pada proses produksi fakta sosial layaknya seperti yang dilakukan pada tradisi beraliran positivism maupun kalangan Marxis lama. Menurut Suyanto (2013) cara pandang *critical thinking* berprinsip pada, pertama dalam *critical thinking* menolak segala kanonisasi pengetahuan sebuah entitas yang terpisah dan lebih penting dari sebuah tindakan sosial; kedua, penelitian ilmiah nir-kepentingan tidak mungkin dilakukan dalam suatu masyarakat dimana anggota di dalamnya tidak otonom; ketiga, penelitian sosial harus sebuah perjalanan dialektis historis yang berisi komponen historis, bukan sebuah kekakuan atau kebakuan peristiwa dan fenomena yang dinilai dalam konteks kekuatan-kekuatan historis obyektif; keempat, penelitian sosial tidak hanya sebagai sebuah sebab akibat yang linier namun sebagai upaya memahami universalitas dan kontekstualnya; kelima, karena memiliki ke dalam pada kontekstualnya teori kritis nantinya mampu menjangkau pada perubahan-perubahan sosial yang terjadi; dan keenam, berbeda dengan Marxisme orthodox yang menempatkan suprastruktur budaya masyarakat modern pada posisi sekunder teori kritis berorientasi pada dua hal pertama, struktur dan perkembangan otoritasnya, dan kedua keumnculan serta pertumbuhan budaya masyarakat (Suyanto, Bagong 2013:35-36)

Sehingga pada dasarnya dalam penelitian dengan judul “Konvergensi Agenda Neoliberalisme dan Relasi Oligarki dalam Keputusan Politik Kereta Cepat Jakarta Bandung (*High Speed Rail Project*)” memperdebatkan upaya agenda Neoliberalisme dalam konteks struktur ekonomi politik khas Indonesia. Pertama, agenda Neoliberalisme yang di terjemahkan dalam keputusan pembangunan kereta

cepat antara Jakarta-Bandung dengan skema *b to b*. pengembangan yang ditujukan untuk salah satunya adalah mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di empat wilayah yang juga menjadi *Transit Oriented Development (TOD)* yaitu Halim, Karawang, Walini, dan Tegalar. Kedua, dengan analisa ekonomi-politik untuk mengeja kembali bagaimana bayang-bayang - hantu - oligarki pasca rezim Orde Baru atas beroperasinya Neoliberalisme. Perkembangan kajian oligarki di Indonesia selama ini pada bagaimana akses-akses Negara digunakan oleh para swasta dalam konteks penelitian ini adalah pengembang (developer). Sehingga ini yang dilihat sebagai tantangan agenda kapitalisme sejak Orde Baru. Proyek dengan dasar hukum Peraturan Presiden (Perpres) No. 107 tahun 2015 tersebut memeriksa bagaimana para pengembang (developer) dapat mengakses langsung maupun tidak langsung dari keuntungan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Penulis membatasi dan fokus pada bagaimana agenda Neoliberalisme dapat beroperasi dalam ekosistem oligarki dari proyek cepat tersebut. Merujuk pada wilayah Karawang (Jawa barat) dan Walini (Jawa Barat) dimana sudah terjadi perluasan kapital oleh pengembang – yang kemudian dampak selanjutnya mengenai lingkungan.

1.5.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hal ini didasarkan pada dua prasyarat yang ada, pertama mengenai tujuan dari penelitian dan kedua mengenai teknik pengumpulan data penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini seperti pada dasar penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang berusaha menginterpretasikan gejala sosial seperti hubungan sosial dan prosesnya, serta sebab dan akibat dari gejala-gejala sosial. Setidaknya pengertian dasar penelitian deskriptif tersebut senada yang dikemukakan oleh Neuman dimana riset deskriptif menguraikan situasi, *setting*, dan hubungan sosial yang ada secara terperinci (Neuman, 1994: 18-20). Dan teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara untuk disajikan menjadi data (Suyanto & Sutinah, 2015) kualitatif deskriptif – yang pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di dua provinsi, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Provinsi Jawa Barat secara spesifik berada di rencana trase terbaru meliputi stasiun Halim (DKI Jakarta), Karawang (Jawabarat), Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat (Jawabarat), dan Tegalluar (Bandung, Jawabarat). Sekaligus empat titik stasiun tersebut menjadi titik pengembangan ekonomi baru yang menjadi titik fokus penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam menentukan sampel, penulis memperhatikan beberapa pertimbangan seperti korelasi teori dan kebutuhan data dilapangan, keingintahuan yang mendalam atas subyek yang disasar, hingga pada pertimbangan teknis seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan dana penulis. Maka penulis menggunakan cara *purposive sampling*, dimana penulis dalam menarik sampel mempertimbangkan beberapa hal. Seperti karakteristik dari subyek penelitian yang memiliki ciri khas tertentu dan bisa relevan dengan data yang didapat (Harrison 2001: 23). Informan, menjadi sumber utama data dalam penelitian ini. Informan merupakan subyek penelitian yang memahami mengenai informasi dari penelitian. Beberapa macam informan meliputi, informan kunci (*key informan*), atau sering disebut ring satu, merupakan informan yang memiliki informasi, data dan memiliki kedekatan akses atas informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, informan utama, merupakan informan yang terlibat langsung (aktor) dalam proses dan interaksi sosial yang diteliti, dan informan tambahan, informan yang dapat memberikan langsung informasi walaupun tidak terlibat langsung atau tidak ddi dalam interaksi maupun proses sosial yang diteliti (Hendrarso dalam Suyanto 2005: 172).

Dalam peneltiain ini penggunaan informan kunci (*key informan*) menjadi tolgan penulis untuk mendapat informasi awal mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sekaligus membuka informasi kepada subyek lain

yang memungkinkan untuk mendapat informasi atau data kepada orang yang lebih mengetahui dan terlibat langsung baik akses maupun keterlibatan dalam proses sosial utamanya terkait dengan penelitian. Sering disebut sebagai *snow ball*, dilakukan secara berkelanjutan dan berkembang hingga menemukan data atau informasi yang dibutuhkan hingga informasi atau data tidak relevan atau layak dalam penelitian (Horrison 2001: 75). Sehingga dalam penelitian ini tidak dapat ditentukan lebih dahulu siapa dan berapa informan yang dibutuhkan.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu primer dan sekunder untuk menghasilkan penelitian kualitatif deskriptif. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lembaga-lembaga terkait yang dapat mendukung penelitian – bisa berupa data statistik (Sudarso 2005: 55). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kajian pustaka. Data primer didapat dengan menggunakan teknik wawancara. Proses wawancara merupakan proses mendapatkan informasi dengan berbicara langsung pada subyek penelitian (*face to face*) maupun dengan perantara media seperti telepon dan internet. Sedangkan untuk data sekunder didapat dari kajian pustaka.

No.	Jabatan/Instansi	Target Data
1.	PT Kereta Cepat Indonesia-China - Direksi - Pekerja lapangan/teknis	Mendapatkan gambaran, informasi, dan data resmi mengenai pembangunan dan pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

2.	Masyarakat terdampak Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Bekasi - Wilayah Karawang - Wilayah Walini 	Mendapatkan realitas masyarakat terhadap pengaruhnya pembangunan kereta cepat dan pengembangan wilayah untuk ekonomi.
3.	Koalisi Masyarakat penolak kereta cepat <ul style="list-style-type: none"> - #FROMJabar 	
4.	Walhi Jawa Barat	Mempertajam informasi dan konfirmasi data dampak ekologis dan masyarakat terdampak pembangunan di Jawabarat.
5.	Praktisi Lingkungan dan Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> - CitaCitarum - Ahli perencanaan dan kebijakan publik 	Mempertajam data dan mengkonfirmasi temuan dilapangan serta memeriksa data berdasarkan pendapat praktisi.
6.	Akademisi	Mempertajam dan memeriksa kembali kajian dan perdebatan teori serta konsep agar sesuai dengan penelitian ini.

1.5.6 Teknik analisa Data

Penelitian kualitatif merupakan proses yang bertahap dan berkesinambungan dari pengumpulan data, pengelolaan data, hingga analisa data (Hendrarso dalam Suyanto 2005: 172). Sehingga dalam tahap analisa data menjadi rangkaian penting dalam sebuah penelitian deskriptif. Tujuan akhir dari analisa data adalah penyajian data agar lebih mudah dipahami. Mengutip Miles dan Huberman (2007) mengenai tahap-tahap *analysis Interactive* sebagai berikut:

1.5.6.1 Pengumpulan Data (*data Collection*)

Dalam penelitian ini menggunakan dua cara seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, wawancara (*interview*) dan pengumpulan data baik berupa berkas, dokumen, dsb.

1.5.6.2 Reduksi Data (*data reduction*)

Setelah data terkumpul sedemikian banyak diperlukannya mekanisme penggolongan atau kategorisasi sehingga mudah diketahui mana data yang diperlukan mana yang tidak. Bentuk dari reduksi data berupa catatan lapangan maupun ringkasan Tahap ini memudahkan penulis untuk mengidentifikasi data dari awal dan mulai menganalisa setiap kategori dari data. Karena dalam penelitian kualitatif prosedur penelitian utamanya dalam pengelolaan data, analisa data tidak harus ketika data terkumpul (Hendrarso dalam Suyanto 2005: 172).

1.5.6.3 Penyajian Data (*data display*)

Pada tahap penyajian data pola-pola dari temuan yang sudah di reduksi dalam penelitian sudah bermakna dan memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari tahap ini karena informasi sudah tersusun dengan rapi dalam bentuk naratif mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

1.5.6.4 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Tahap akhir dari analisa data adalah penarikan kesimpulan. Prinsipnya penelitian dapat mencari makna di dalam data yang ditemukan sehingga dapat diperoleh, dalam pencarian makna ini penulis berusaha mencari kesimpulan secara keseluruhan.